

PARTISIPASI POLITIK SISWA SEBAGAI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI SMA NEGERI

Lianita Darise¹, Sastro M. Wantu², Ramli Mahmud³

Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Gorontalo¹²³
e-mail: lianitadarise3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada Pemilu 2024 di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap siswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik siswa tergolong cukup tinggi dalam aspek voting, didorong oleh kesadaran pribadi serta pengaruh dari guru, orang tua, dan teman sebaya. Namun, partisipasi dalam bentuk lain seperti kampanye, contracting, dan cooperative masih rendah karena keterbatasan waktu, izin orang tua, dan kesibukan sekolah. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi siswa meliputi faktor sosial seperti lingkungan yang kurang peduli politik, kurangnya diskusi, serta dominasi hiburan di media sosial; faktor politik berupa rendahnya kepercayaan terhadap partai dan calon; serta faktor budaya dan kondisi fisik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik dan dukungan lingkungan agar pemilih pemula dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan menyeluruh dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilu 2024, Siswa, SMA Negeri 4 Gorontalo, Faktor Penghambat

ABSTRACT

This research aims to examine the forms of political participation among students as first-time voters and the factors influencing it during the 2024 General Election at SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. This research employs a descriptive qualitative research method, data were collected through observation, interviews, and documentation involving students who met the criteria as eligible voters. The findings indicate that students demonstrated a relatively high level of political participation in the form of voting, primarily driven by personal awareness as well as influence from teachers, parents, and peers. However, participation in other forms, such as campaigning, contracting, and cooperative activities, remains low due to time constraints, lack of parental permission, and academic responsibilities. Several inhibiting factors were identified, including social factors such as politically indifferent environments, limited discussions, and the dominance of entertainment on social media; political factors such as low trust in political parties and candidates, as well as cultural and physical conditions. Therefore, there is a need to strengthen political education and provide supportive environments so that firsttime voters can engage more actively and comprehensively in the democratic process.

Keywords: Political Participation, First-Time Voters, 2024 General Election, Students, SMA Negeri 4 Gorontalo, Inhibiting Factors

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi fondasi bagi proses pergantian kekuasaan yang sah dan damai serta cerminan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Menurut Yunindyawati et al. (2023), pemilu bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk

konkret dari pendeklasian kedaulatan rakyat kepada perwakilan yang dipercaya untuk menjalankan amanat rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana partisipasi warga negara dalam setiap tahapan proses demokrasi tersebut, terutama dalam hal memilih secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem demokrasi langsung, keterlibatan masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas demokrasi itu sendiri.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator vital dalam menilai kualitas suatu negara demokrasi. Kharisma (2021) menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup seluruh tindakan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini termasuk hak untuk memilih, menyampaikan pendapat, mengikuti kegiatan organisasi politik, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, keberadaan warga negara yang aktif secara politik bukan hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga mendorong terwujudnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi ini menjadi lebih penting ketika menyangkut kelompok usia muda, khususnya pemilih pemula yang akan memberikan suara mereka untuk pertama kali dalam proses pemilu.

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam sistem demokrasi karena berada dalam tahap awal kesadaran politik dan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Menurut data yang disampaikan oleh Sutrisno dan Rif'atuss'adah Sitorus Pane (2023), pada Pemilu 2024 diperkirakan jumlah pemilih pemula mencapai lebih dari 53% dari total 107 juta pemilih. Jumlah ini menunjukkan bahwa suara pemilih pemula sangat signifikan dalam menentukan hasil pemilu. Sayangnya, tingginya kuantitas pemilih pemula tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik mereka. Kurangnya pengetahuan, minimnya pengalaman politik, dan lemahnya pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak pilih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara potensi pemilih pemula dengan realitas kesadaran politik mereka yang masih rendah.

Di tingkat sekolah menengah, pembentukan karakter siswa melalui pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku demokratis siswa, termasuk dalam membekali mereka dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS dan Pramuka dapat menjadi media penguatan literasi politik, karena di dalamnya terdapat proses pembelajaran kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung pembentukan karakter kewarganegaraan. Namun, berdasarkan pengamatan awal, partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Kurangnya pembiasaan diskusi politik, tidak adanya program literasi politik terstruktur, serta minimnya simulasi pemilu di lingkungan sekolah menyebabkan siswa belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tingkat partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024 di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan siswa dalam proses politik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda, khususnya di lingkungan sekolah menengah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan politik yang lebih efektif dan aplikatif di kalangan pemilih pemula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh bentuk partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada Pemilu 2024. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, wawancara mendalam dengan beberapa siswa kelas XII yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, serta guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dokumentasi seperti brosur, foto kegiatan, serta data sekolah juga dimanfaatkan untuk memperkuat informasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu informasi langsung dari wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan pemilu. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi, baik dari segi sumber maupun metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas dan sistematis mengenai hasil penelitian, berikut disajikan tabel yang memuat bentuk-bentuk partisipasi politik siswa SMA Negeri 4 Kota Gorontalo sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024 serta faktor-faktor yang menghambat keterlibatan mereka. Selain itu, data ini juga divisualisasikan dalam bentuk grafik batang untuk memperjelas perbandingan tingkat partisipasi dan pengaruh masing-masing faktor penghambat terhadap partisipasi politik siswa.

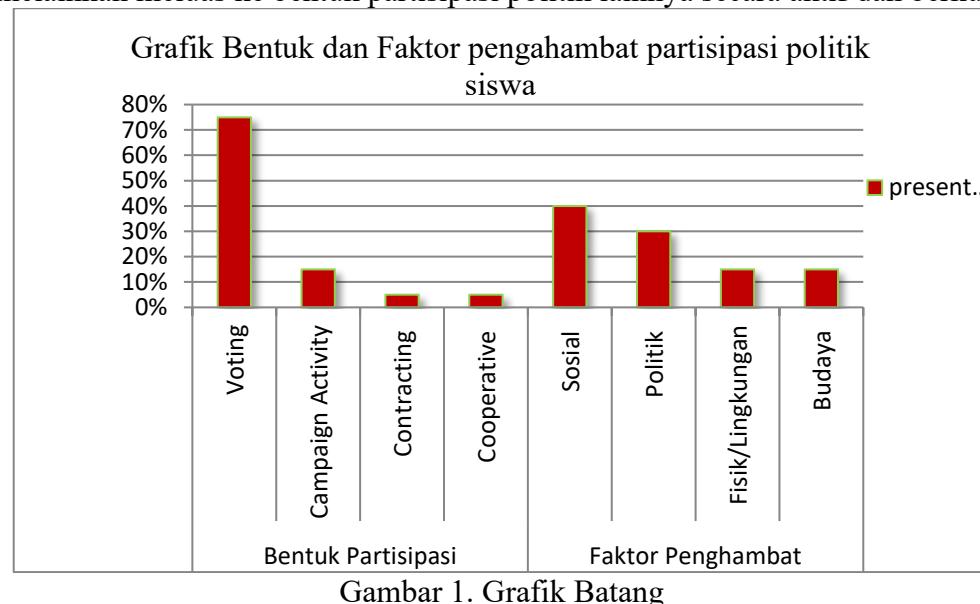
Tabel 1. Bentuk Partisipasi Dan Faktor Penghambat Partisipasi Politik Siswa Pada Pemilu 2024 Di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo

Aspek Penelitian	Kategori/Bentuk	Deskripsi Temuan
Bentuk Partisipasi	Voting	Mayoritas siswa kelas XII yang memenuhi syarat administratif telah memilih. Didorong oleh kesadaran pribadi, keluarga, guru, teman sebaya, sosialisasi KPU, dan media sosial.
	Campaign Activity	Rendah. Cenderung pasif. Sebagian siswa hanya membagikan konten kampanye di media sosial tanpa terlibat aktif.
	Contracting	Sangat terbatas. Hanya sedikit siswa yang menghubungi penyelenggara pemilu atau calon legislatif, misalnya lewat diskusi daring.
	Cooperative	Terbatas. Lebih banyak dilakukan oleh siswa aktif di OSIS/ekstrakurikuler. Mayoritas siswa lainnya masih pasif.
Faktor Penghambat	Sosial	Lingkungan pergaulan apatis, kurang dukungan keluarga, minim diskusi politik, rasa minder, anggapan politik hanya untuk dewasa.

	Politik	Tidak percaya partai/calon, praktik politik uang, kurang informasi, kebingungan memilih.
	Fisik/Lingkungan	Sakit, kelelahan, jarak TPS jauh, akses sulit
	Budaya	Nilai keluarga/masyarakat tidak menekankan pentingnya partisipasi politik, sikap pasif.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik siswa SMA Negeri 4 Kota Gorontalo sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024 paling dominan berupa voting, dengan tingkat keterlibatan mencapai 75%. Sementara itu, bentuk partisipasi lain seperti campaign activity, contacting, dan cooperative masih tergolong rendah dan bersifat pasif.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat partisipasi politik siswa, di antaranya faktor sosial yang paling berpengaruh sebesar 40%, disusul faktor politik (30%), serta faktor fisik/lingkungan dan budaya masing-masing sebesar 15%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran untuk menggunakan hak pilih cukup tinggi, masih diperlukan upaya penguatan pendidikan politik, pembinaan lingkungan sosial, dan peningkatan kepercayaan siswa terhadap proses politik agar keterlibatan mereka tidak hanya berhenti pada voting, melainkan meluas ke bentuk partisipasi politik lainnya secara aktif dan berkualitas.



Gambar 1. Grafik Batang

Gambar 1 menggambarkan perbandingan antara bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh siswa dan sejumlah faktor yang menjadi penghambatnya. Terlihat bahwa kegiatan memberikan suara (voting) menjadi bentuk partisipasi yang paling umum dilakukan oleh siswa, sementara keterlibatan dalam bentuk lain seperti kampanye atau kerja sama sosial-politik masih cukup terbatas. Ini menunjukkan bahwa siswa cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik formal dibandingkan bentuk informal yang membutuhkan inisiatif atau interaksi lebih tinggi.

Adapun dari sisi faktor penghambat, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, minimnya diskusi seputar isu politik, serta keterbatasan informasi menjadi

penyebab utama rendahnya keterlibatan siswa dalam aspek-aspek partisipatif lainnya. Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik dan calon juga turut memperkuat sikap pasif siswa terhadap politik. Hasil ini mengindikasikan pentingnya upaya intensifikasi pendidikan politik di sekolah serta perlunya kerja sama antara guru, keluarga, dan lembaga terkait agar pemilih pemula dapat lebih aktif, kritis, dan berdaya dalam proses demokrasi.

Pembahasan

Partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 di SMA Negeri 4 kota gorontalo

Partisipasi politik merupakan unsur krusial dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Di kalangan pemilih pemula, khususnya siswa SMA, keterlibatan dalam pemilu bukan sekadar hak politik, tetapi juga bagian dari proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Bisri, 2013), partisipasi politik mencerminkan keterlibatan individu dalam upaya memengaruhi arah kebijakan publik dan pengambilan keputusan pemerintah. Bentuk-bentuk partisipasi ini meliputi pemberian suara, kampanye, komunikasi dengan pejabat publik, dan keterlibatan dalam organisasi sosial.

Dalam konteks siswa SMA Negeri 4 Kota Gorontalo sebagai pemilih pemula, partisipasi politik memiliki makna strategis. Verba dan Nie (dalam Morissan, 2014) membagi bentuk partisipasi menjadi voting, campaign activity, contacting, dan cooperative activity. Meski pemilu merupakan wujud paling nyata dari partisipasi politik, bentuk lain seperti diskusi politik, penggunaan media sosial untuk menyampaikan opini, hingga keterlibatan dalam organisasi intra sekolah, juga mencerminkan keterlibatan politik yang signifikan di kalangan siswa.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berperan besar dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula. Martini et al. (2024) mengemukakan bahwa pendidikan politik secara langsung meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban politiknya. Temuan serupa dikemukakan Yunindiyawati et al. (2023), yang menyebut bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan demokratis mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam isu politik lokal. Zarkasi dan Rizal (2020) juga menekankan pentingnya peran siswa dalam simulasi pemilu dan forum diskusi sebagai metode pembelajaran politik yang menyenangkan dan efektif. Hal ini didukung oleh Hasanah dan Sulha (2023), yang menggarisbawahi bahwa pendidikan politik yang aplikatif lebih mampu menumbuhkan kesadaran politik dibandingkan metode pembelajaran yang bersifat teoritis semata.

Namun, di balik pentingnya pendidikan politik dan antusiasme siswa, masih terdapat berbagai faktor yang menjadi kendala dalam partisipasi politik pemilih pemula, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor penghambat partisipasi politik agar dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dalam peningkatan keterlibatan siswa dalam proses demokrasi.

Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi menjadi determinan utama dalam membentuk akses siswa terhadap informasi politik dan ruang partisipasi yang inklusif. Burdiardjo (2008) menyebut bahwa kondisi seperti pendapatan orang tua, tingkat pendidikan keluarga, serta status sosial memiliki korelasi dengan minat dan kesempatan siswa untuk terlibat dalam proses politik. Wahidiyah (2022) menemukan bahwa pemilih pemula dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung kurang memiliki motivasi karena terbatasnya akses terhadap sumber

informasi dan pendidikan politik yang layak. Nur Wardhani (2018) menambahkan bahwa keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi tingkat pengetahuan politik siswa, tetapi juga berdampak pada persepsi mereka terhadap pentingnya peran dalam pemilu.

Faktor Politik

Faktor ini mencakup kurangnya komunikasi politik yang efektif, rendahnya kesadaran politik, serta minimnya pemahaman tentang mekanisme pemilu. Azzuhri (2022) menyatakan bahwa komunikasi politik yang terbatas menyebabkan siswa tidak memiliki keterhubungan langsung dengan isu-isu kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Persepsi negatif terhadap politik dan pengalaman masa lalu yang penuh dengan konflik juga menyebabkan munculnya sikap skeptis dan apatis. Hal ini sejalan dengan temuan Susanto dan Abra (2024), yang menjelaskan bahwa persepsi negatif terhadap pejabat publik atau partai politik berdampak pada enggannya siswa untuk ikut serta dalam pemilu.

Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor ini merujuk pada kondisi geografis, sarana prasarana, serta lingkungan sosial siswa. Burdiardjo (2008) menekankan bahwa terbatasnya fasilitas umum dan akses transportasi menjadi penghalang keterlibatan siswa dalam aktivitas politik di luar sekolah. Rungkat et al. (2023) menemukan bahwa siswa di daerah pedesaan atau terpencil memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi politik karena jauhnya lokasi tempat tinggal dan minimnya kehadiran lembaga politik seperti KPU atau Bawaslu. Qulsum et al. (2020) juga menyebut bahwa ketidakhadiran tokoh politik di tingkat lokal membuat siswa sulit untuk mendapatkan figur teladan dalam berpolitik.

Faktor Nilai Budaya dan Civic Culture

Nilai budaya atau civic culture berpengaruh besar terhadap cara individu memandang keterlibatan politik. Azzuhri (2022) menegaskan bahwa rendahnya budaya kewargaan, seperti kebiasaan berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau berorganisasi, menjadi penghambat utama partisipasi politik pemilih muda. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan budaya politik pasif, siswa cenderung meniru pola sikap tersebut dan memandang bahwa keterlibatan politik bukanlah sesuatu yang penting atau relevan. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya pembiasaan sikap kritis di lingkungan keluarga dan sekolah.

Kurangnya Pendidikan Politik yang Kontekstual dan Partisipatif

Pendidikan politik di sekolah sering kali masih bersifat kognitif dan belum menyentuh aspek afektif dan psikomotorik siswa. Kharisma (n.d.) menyatakan bahwa pendekatan pendidikan politik yang hanya menekankan hafalan konsep tidak akan mampu membentuk kesadaran dan sikap politik siswa. Sebaliknya, pendidikan yang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan politik seperti simulasi pemilu, debat isu-isu publik, serta pemilihan ketua OSIS dengan mekanisme demokratis akan jauh lebih berdampak. Sutrisno dan Sitorus Pane (2023) juga menekankan pentingnya pelibatan siswa dalam kegiatan yang mencerminkan kehidupan demokratis, seperti musyawarah kelas atau forum siswa, untuk menumbuhkan kebiasaan menyampaikan pendapat dan menerima perbedaan secara konstruktif.

Minimnya Sosialisasi dari Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kehadiran lembaga pemilu seperti KPU atau Bawaslu di lingkungan sekolah masih sangat terbatas. Prasetyo et al. (2019) dan Hidayat (2021) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan lembaga resmi sering kali bersifat umum dan tidak menjangkau

kelompok pemilih pemula secara spesifik. Padahal, pemilih muda merupakan kelompok strategis yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan pemilu. Kurangnya interaksi langsung antara siswa dan penyelenggara pemilu menyebabkan terbatasnya pemahaman siswa terhadap prosedur dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi pendidikan politik yang bersifat integratif dan adaptif. Pertama, pendidikan politik di sekolah harus melibatkan pendekatan berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*), seperti debat politik, simulasi pemilu, dan diskusi kelas mengenai isu-isu aktual. Kedua, guru PPKn perlu didorong untuk menjadi fasilitator demokrasi dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka dan aman bagi siswa. Ketiga, kolaborasi antara sekolah dan lembaga penyelenggara pemilu harus diperkuat, dengan menghadirkan program sosialisasi yang menyasar siswa secara aktif dan partisipatif.

Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana literasi politik yang efektif, mengingat tingginya penggunaan platform digital di kalangan remaja. Namun demikian, perlu pendampingan agar siswa dapat membedakan antara informasi yang kredibel dan yang bersifat manipulatif. Dalam hal ini, keterlibatan keluarga dan komunitas lokal juga penting untuk membentuk lingkungan yang mendukung praktik demokrasi sejak usia dini.

Kesadaran bahwa setiap suara memiliki arti dan bahwa keterlibatan politik merupakan bagian dari identitas kewarganegaraan harus ditanamkan secara terus-menerus. Jika tidak, maka partisipasi politik hanya akan bersifat simbolik dan tidak berdampak pada perubahan sosial yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo pada Pemilu 2024 tergolong cukup tinggi, terutama dalam bentuk voting, yang dipengaruhi kesadaran pentingnya suara dan dukungan lingkungan. Namun, keterlibatan dalam bentuk partisipasi lain masih rendah akibat hambatan administratif, kurangnya informasi, lingkungan sosial yang apatis, dan nilai budaya. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan politik yang lebih praktis dan menarik agar siswa tidak hanya aktif memilih, tetapi juga terlibat dalam aktivitas politik lainnya. Ke depan, hasil penelitian ini berpotensi menjadi dasar pengembangan program pendidikan politik di sekolah dan penelitian lanjutan untuk mengatasi hambatan partisipasi politik pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzuhri, H. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 66–76. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12692>
- Hasanah, S. U., & Sulha. (2023). Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi siswa sebagai pemilih pemula di Kota Singkawang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 112–124. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/7475>
- Hidayat, S. (2021). *Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu tahun 2019 (Studi kasus di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang].
- Kharisma, D. (n.d.). *Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda 1*.
- Martini, D., Azwar, A., & Pringga, H. (2024). Pengaruh pendidikan politik terhadap kesadaran partisipasi pemilih pemula di SMK PGRI 1 Cimahi. *Jurnal Kewarganegaraan*,

- 8(1), 45–58.
<https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/757>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–66. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 1(1), 10–20. <https://doi.org/10.32585/cessj.v1i1.360>
- Qulsum, S., Purnamasari, H., & Azizah, A. N. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang periode 2020–2026. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 102–112. <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2195>
- Rungkat, J., Puspita, T. Y., Padang, N. S., Budiono, & Narwadan, B. (2023). Partisipasi politik warga Kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika pada Pemilu tahun 2019. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.55334/sostek.v2i1.57>
- Susanto, S., & Abra, H. (2024). Pengetahuan dan persepsi politik pemilih pemula: Studi pada siswa SMA di Kota Batam. *Jurnal Bawaslu: Kajian Pengawasan Pemilu*, 6(1), 88–101. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/439>
- Sutrisno, & Pane, R. S. S. (2023). Pendidikan politik pemilih pemula pada pemilihan umum (PEMILU) tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. *Malewa: Journal of Multidisciplinary Educational Research*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.61683/jome.v1i01.4>
- Wahidiyah, R. A. (2022). Analisis Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2021. ୨୮୭, 8.5.2017, 2003–2005.
- Zarkasi, A., & Rizal, D. (2020). Pendidikan politik terhadap pemilih pemula di SMA Negeri 4 Kota Jambi untuk menghadapi pemilihan gubernur tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 113–117. <http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi/article/view/pendidikanpolitik>